

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 13

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Adeksi Dorong Peran DPRD dalam Pengelolaan DAK

PALANGKA RAYA, PPOST

Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Se-Indonesia (Adeksi), yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di Jakarta.

Sigit menyampaikan, RDP tersebut digelar untuk membahas peranan lembaga DPRD dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional.

"Menjadi konsen kami adalah peran DPRD dalam pengelolaan DAK. Lalu, peran DPRD dalam mempercepat pembangunan dae-

rah serta mencapai prioritas nasional," sebut Sigit dalam rilisnya, Kamis (17/6).

Lebih jauh legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, sejumlah masalah yang kerap ditemui seputar DAK cukup beragam. Mulai dari level konsep, kemudian adanya ketidakseimbangan kewenangan antara pusat sebagai pemegang otoritas dan-daerah sebagai penerima.

"Sedangkan jika ditilik dari segi mekanisme perencanaan hingga pelaporan DAK, maka yang menjadi permasalahan seperti paradigma money follow program belum terwujud optimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Kemudian DAK pada umumnya masih berorientasi jangka pendek, pendekatan kolaborasi multistakeholder belum optimal dalam perencanaan, penganggaran, laporan dan monitoring evaluasi hingga belum optimalnya pendekatan yang disinsentif dalam penyerapan DAK di daerah.

"Disini lah kepada BAKN kami usulkan agar ada kebijakan penguatan peran DPRD

dalam pengelolaan DAK melalui pendekatan insentif dan disinsentif sebagaimana trifungsi DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan," bebernya.

Selain itu, tambah Sigit, juga disarankan agar dalam alokasi DAK harus didukung capacity building bagi pemda dan DPRD, adanya kelembagaan multi-stakeholder dari hulu ke hilir serta pola pengelolaan swakelola perlu dievaluasi yang dibarengi dengan pemberdayaan SDM.

"Kedepan diperlukan langkah digitalisasi sistem untuk menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, terukur dan berkelanjutan," jelas Sigit. (fys/P4)